

Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Wilayah Dalam Upaya Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Jambi

Taufik Z. Karim¹, Heeppy Haryadi Harahap², Mardalena Mardalena³

^{1,2,3} Program Doktor Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan IPB University

Jl. Raya Darmaga Kampus IPB Darmaga Bogor 16680 Jawa Barat, Indonesia

E-mail: bisataufik@apps.ipb.ac.id¹, h33ppyharyadi@apps.ipb.ac.id²,
Mardalena1978mardalema@apps.ipb.ac.id³

Abstract. *This study aims to find regional economic growth in Jambi Province, regional inequality, and sustainable development achievements in Jambi Province. The research method uses quantitative methods. The secondary data used is in the form of time series data for 2010-2021. Data analysis techniques were carried out using the Klassen Typology method, the Williamson inequality index, Theil Entropy Index, and the Promethee method to make decision criteria. The study results show that the economic growth of the districts/cities in Jambi Province included in Quadrant I is the City of Sungai Full. Quadrant II is Tanjung Jabung Timur and Tanjung Jabung Barat. At the same time, Quadrant III is Kerinci Regency, Merangin Regency, Sarolangun Regency, Batanghari Regency, Muaro Jambi Regency, Tebo Regency, Bungo Regency, and Jambi City. In Quadrant IV, no districts/cities fall into this category. The results of the Williamson Index have inequality criteria from low to moderate. The low inequality value is in Batanghari Regency, and the high is in West Tanjung Jabung Regency. While the highest Theil Entropy index value is in West Tanjung Jabung Regency, with a value of 2.84, and the lowest value is in Merangin Regency, with a value of 0.44. Meanwhile, the results of the analysis of sustainable development using the Promethee method show that Sarolangun Regency has the highest score of 0.4750, and the lowest level of achievement of sustainable development is Merangin Regency with a score of -0.4000.*

Keywords: *Economic Growth, Klassen Typology, Regional Inequality, Williamson Index, Theil Entropy Index.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi Jambi, ketimpangan wilayah, dan capaian pembangunan berkelanjutan di Provinsi Jambi. Metode penelitian menggunakan metode kuantitatif. Data sekunder yang digunakan berupa data time series tahun 2010-2021. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan metode Klassen Typology, indeks ketimpangan Williamson, Indeks Theil Entropy, dan metode Promethee untuk membuat kriteria keputusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jambi yang termasuk dalam Kuadran I adalah Kota Sungai Penuh. Kuadran II adalah Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat. Sedangkan Kuadran III adalah Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tebo, Kabupaten Bungo, dan Kota Jambi. Pada Kuadran IV, tidak ada kabupaten/kota yang masuk dalam kategori tersebut. Hasil Indeks Williamson memiliki kriteria ketimpangan rendah hingga sedang. Nilai ketimpangan yang rendah terdapat di Kabupaten Batanghari, dan nilai ketimpangan yang tinggi terdapat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sedangkan nilai indeks Theil Entropy tertinggi terdapat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar 2,84 dan nilai terendah terdapat di Kabupaten Merangin sebesar 0,44. Sedangkan hasil analisis pembangunan berkelanjutan dengan metode Promethee menunjukkan Kabupaten Sarolangun mempunyai skor tertinggi sebesar 0,4750, dan tingkat pencapaian pembangunan berkelanjutan terendah adalah Kabupaten Merangin dengan skor -0,4000.

Kata Kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Tipologi Klassen, Ketimpangan Regional, Indeks Williamson, Indeks Theil Entropy.

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan suatu proses perbaikan berkesinambungan atas suatu masyarakat atau suatu system sosial secara keseluruhan menuju kehidupan yang lebih baik (Rustiadi at al. 2011). Pembangunan harus memebuhiVekonomi, dan keberlanjutan. Namun, sebagian pakar ekonomi pembangunan berpendapat bahwa hakekat pembangunan secara sederhana adalah terjadinya pertumbuhan ekonomi. Pandangan tentang pembangunan sebatas pertumbuhan ekonomi, mendapat kritik oleh David Ricardo. Ricardo menyampaikan pandangan pesimis bahwa pada mulanya jumlah penduduk rendah dan kekayaan masih banyak sebagai akibat para pengusaha memperoleh keuntungan. Keuntungan tinggi mengakibatkan peningkatan investasi dan perluasan usaha, sehingga permintaan tenaga kerja naik. Hal seperti ini dapat memicu pertumbuhan penduduk yang sangat cepat, sedangkan luas lahan tetap, mengakibatkan produktivitas pekerja semakin kecil sedangkan biaya produksi semakin besar, akhirnya keuntungan perusahaan menurun. Pada tahap ini, perekonomian mencapai puncak atau telah berhenti (*stationary state*).

Menurut Friend (2000), terdapat tiga sisi (interface) konsep umum mengenai indikator pembangunan keberlanjutan, yaitu 1) *culture ecology interface*, pembangunan berkelanjutan merupakan fungsi terintegrasi nilai-nilai budaya yang menyatu dalam ekosistem. 2) *culture economy interface*, menggambarkan konservasi lingkungan dengan tujuan budaya. 3) *economy ecology interface*, indikator pembangunan diukur dengan cadangan konservasi alam dan ekonomi untuk kegiatan produksi. Rustiadi et al. (2011), Indikator tujuan pembangunan terdiri dari *growth* (produktifitas, efisiensi dan pertumbuhan), *equity* (pemerataan keadilan dan keberimbangan) dan *sustainability* (keberlanjutan). Adapun pelaksanaan pembangunan berkelanjutan Provinsi Jambi Tahun 2016-2020, dalam RPJMD Provinsi Jambi, dari 289 indikator pembangunan berkelanjutan yang kemudian dicerminkan oleh 219 atau 75,8% target pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional hanya 197 atau 90% target pembangunan berkelanjutan yang relevan dengan karakter yang dimiliki oleh Provinsi Jambi. Sebagaimana terlihat pada tabel 1.

Tabel 1. Capaian tujuan pembangunan berkelanjutan Provinsi Jambi periode 2016 – 2020

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2020	Indikator PB (Metadata SDGs 2020 v.2)	Target PB Nasional 2019	Capaian PB Nasional 2019/2020	Melebihi capaian nasional (2019/2020)	Belum > capaian nasional (2019/2020)	Belum dilaksanakan	Belum teridentifikasi	
1	Tanpa kemiskinan	14	23	21	16	4	1	
2	Tanpa kelaparan	16	9	9	4	4	1	
3	Kehidupan sehat dan sejahtera	31	36	32	16	13	3	
4	Pendidikan berkualitas	14	18	17	8	7	2	
5	Kesetaraan gender	12	16	13	6	3	4	
6	Energi bersih dan terjangkau	7	6	6	3	3	-	
7	Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi	19	17	16	8	6	2	
8	Industri, inovasi dan infrastruktur	21	15	8	-	3	5	
9	Berkurangnya kesenjangan	17	16	13	6	2	5	
10	Kemitraan untuk mencapai tujuan	25	14	9	4	3	2	
11	Air bersih dan sanitasi layak	10	1	9	2	-	7	
12	Kota dan pemukiman yang berkelanjutan	17	3	3	1	1	1	
13	Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab	17	7	4	-	1	3	
14	Penanganan perubahan iklim	9	1	5	1	-	4	
15	Ekosistem lautan	10	7	6	1	4	1	
16	Ekosistem daratan	14	3	4	-	1	3	
17	Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh	36	27	22	9	3	10	
	Total	289	219	197	85	58	54	
			75.80%	90%	43.15%	29.44%	0.00%	27.41%

Sumber: RPJMD Provinsi Jambi 2021-2026

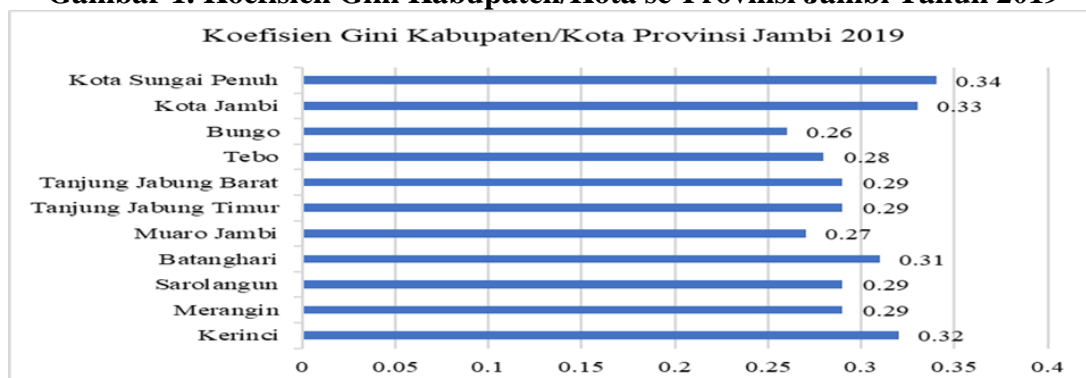
Berdasarkan tabel 1, dari target pembangunan berkelanjutan nasional tersebut, 85 target (43,2%) dapat dicapai, 58 target (29,4%) belum dapat dicapai, dan belum dapat diidentifikasi karena keterbatasan data yang tersedia adalah sebanyak 55 target (27,4%).

Sementara Vaulina dan Liana (2015), menyebutkan bahwa tolok ukur keberhasilan pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi dan kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk, antar daerah dan antar sektor. Namun, kenyataannya pertumbuhan ekonomi tidak selamanya dibarengi dengan pemerataan. Akhirnya, ketimpangan antar daerah seringkali menjadi masalah serius. Todaro (2004), dampak positif dari ketimpangan yaitu sebagai pendorong wilayah lain yang kurang maju, untuk dapat bersaing dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dampak negatif dari ketimpangan yaitu inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, serta ketimpangan yang tinggi akan sering dipandang tidak adil. Dampak negatif ketimpangan inilah, yang akan menjadi masalah pembangunan dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Menurut Sjafrizal (2012), ada lima faktor yang mempengaruhi ketimpangan antar wilayah yaitu 1) perbedaan sumber daya alam, 2) faktor demografis termasuk kondisi tenaga kerja, 3) alokasi dana pembangunan antar wilayah baik investasi pemerintah maupun investasi swasta, 4) konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah, dan 5) mobilitas barang dan jasa. Oleh sebab itu, setiap daerah biasanya terdapat wilayah maju (*developed region*) dan wilayah terbelakang (*undervedoped region*), seperti yang terjadi di Provinsi Jambi.

Salah satu indikator yang digunakan untuk mempelajari ketimpangan pendapatan adalah indeks gini yang angkanya bervariasi antara 0 dan 1. Koefisien gini yang mendekati 0 menunjukkan pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan

yang sama, sedangkan koefisien gini yang mendekati 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna.

Gambar 1. Koefisien Gini Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi Tahun 2019



Sumber: RPJMD Provinsi Jambi 2021-2026

Berdasarkan dokumen RPJMD Provinsi Jambi, data koefisien gini tahun 2019, menunjukkan daerah perkotaan lebih tinggi daripada perdesaan dengan indeks masing-masing sebesar 0,34 dan 0,28. Jika dilihat data per kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi, secara umum indeks gini pada masing-masing kabupaten/kota memperlihatkan indeks yang fluktuatif namun memperlihatkan ketimpangan yang cenderung menyempit (Gambar 1).

Khabibah (2018), pertumbuhan ekonomi ditandai dengan peningkatan produk domestik regional bruto (PDRB) disuatu wilayah dalam periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi yang cepat akan berdampak pada ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Maka peranan pemerintah daerah sangat penting dalam menentukan kebijakannya (Vaulina dan Liana, 2015), sehingga dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya ketimpangan antar wilayah. Berikut laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi (Tabel 2).

Tabel 2. Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Perkapita Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2021

No.	Wilayah	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Pendapatan Per kapita (Juta)
1.	Kerinci	4,16	27,2
2.	Merangin	5,09	29,2
3.	Sarolangun	6,61	38,8
4.	Batanghari	4,74	39,8
5.	Muaro Jambi	4,08	41,4
6.	Tanjung Jabung Timur	0,13	74,6
7.	Tanjung Jabung Barat	1,36	96,6
8.	Tebo	4,32	31,1
9.	Bungo	5,12	35,8
10.	Kota Jambi	3,94	31,9
11.	Kota Sungai Penuh	3,67	48,8
Provinsi Jambi		3,93	42,9

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2022. Data diolah

Berdasarkan tabel 2, diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dari Provinsi Jambi adalah Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, dan Kota Sungai Penuh. Sedangkan tiga daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi dari provinsi adalah Sarolangun, Bungo, dan Merangin. Sementara untuk pendapatan per kapita yang lebih rendah dari provinsi terdapat di daerah Kerinci, Merangin, Sarolangun, Batanghari, Muaro Jambi, Tebo, Bungo, dan Kota Jambi. Ternyata, daerah yang pertumbuhan ekonomi lebih rendah dari provinsi memiliki pendapatan per kapita lebih tinggi dari provinsi seperti Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat dan Kota Sungai Penuh. Sebaliknya, daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari provinsi memiliki pendapatan per kapita lebih rendah.

Sejauh ini, belum ditemukan daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah dari provinsi, kemudian memiliki pendapatan per kapita yang rendah pula di Provinsi Jambi. Kondisi perekonomian di Provinsi Jambi secara tidak langsung menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat antar daerah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas tentang ketimpangan wilayah, pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan yang terjadi di Provinsi Jambi, sehingga tujuan penelitian adalah 1) menganalisis pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi, 2) menganalisis ketimpangan wilayah Provinsi Jambi, dan 3) menganalisis pencapaian pembangunan berkelanjutan di Provinsi Jambi.

Kajian Literatur

Pertumbuhan Ekonomi

Adisasmita (2013), pertumbuhan ekonomi adalah upaya meningkatkan kapasitas produksi untuk mencapai penambahan output atau pendapatan, yang diukur menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam suatu wilayah. Tarigan (2007), pertumbuhan ekonomi wilayah adalah penambahan pendapatan masyarakat yang terjadi di suatu wilayah, yaitu adanya kenaikan seluruh nilai tambah yang terjadi di wilayah tersebut. Robert Solow (1924), dikenal dengan model Solow, menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan fungsi tenaga kerja dan modal. Lincoln Arsyad (1999), pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan gross domestic product (GDP)/ gross national product (GNP) tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak.

Todaro (2000), berpendapat dari berbagai teori pertumbuhan mulai dari teori Harold Domar, Neoklasik, Solow, maupun teori endogen dicetus Romer, ada tiga faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. a) Akumulasi modal, yang meliputi semua jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia. b) Pertumbuhan penduduk, yang akan berkontribusi pada jumlah angkatan kerja. dan c) Kemajuan teknologi. Paul Romer (2018), mengembangkan teori pertumbuhan Neoklasik dengan menyertakan teknologi.

Menurut Adisasmita (2014), ada beberapa indikator tolok ukur pertumbuhan ekonomi wilayah, pertama ketidakseimbangan pendapatan karena dapat diterapkan untuk menilai keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu wilayah. Kedua, perubahan struktur perekonomian, selain berorientasi pada sektor pertanian, perlu juga mengembangkan sektor industri. Ketiga, pertumbuhan kesempatan kerja dengan mendorong pembangunan prasarana jalan yang menjangkau ke seluruh kantong-kantong produksi. Keempat, tingkat dan penyebaran kemudahan yang diartikan sebagai kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan melakukan kegiatan usaha. Dan Kelima, produk domestik regional bruto merupakan ukuran prestasi (keberhasilan) seluruh kegiatan ekonomi.

Menurut Laurensius Julian (2010), saat ini terdapat lima (lima) faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu sumber daya alam, kuantitas dan kualitas pendidikan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi, sistem sosial dan terakhir pasar. Sementara itu, Hasyim (2016) menjelaskan bahwa ada tiga komponen dasar pertumbuhan ekonomi suatu negara, yaitu pertama, pertumbuhan pasokan barang yang berkesinambungan, dan kedua, teknologi maju sebagai faktor utama yang menentukan tingkat pertumbuhan. dari keragaman pasokan. dan ketiga, meluasnya penggunaan teknologi.

Ketimpangan Wilayah

Jeffrey G. Williamson dalam penelitiannya mengenai hubungan antara ketimpangan wilayah dan tingkat pembangunan ekonomi menggunakan data ekonomi negara maju dan negara berkembang. Ditemukan bahwa pada tahap awal pembangunan, ketimpangan antar wilayah semakin meningkat dan pembangunan terkonsentrasi pada daerah-daerah tertentu. Namun, melihat pertumbuhan ekonomi pada tahapan yang lebih matang, terlihat adanya keseimbangan antar wilayah dan disparitasnya mengecil secara signifikan.

Ukuran ketimpangan antar wilayah awalnya ditemukan Williamson Index yang digunakan dalam studi Jeffrey G Williamson pada tahun 1965. Menurut Sjafrizal (2008), Williamson Index menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita sebagai data dasar karena membandingkan tingkat pembangunan antar wilayah dan bukan tingkat kemakmuran antar kelompok.

Simon Fuglsang (2013), Perbedaan pendapatan dapat disebabkan oleh faktor ekonomi atau non ekonomi. Faktor ekonomi adalah situasi ekonomi makro daerah. Faktor non ekonomi meliputi kondisi demografis, kondisi alam, politik dan budaya daerah .

Sjafrizal (2012), menyebutkan bahwa terdapat beberapa faktor utama yang dapat menimbulkan ketimpangan antar wilayah, yaitu 1) Perbedaan kandungan sumber daya alam akan mempengaruhi kegiatan produksi di wilayah tersebut. 2) Kondisi demografi mempengaruhi produktivitas tenaga kerja masyarakat setempat. 3) Berkurangnya mobilitas barang dan jasa, termasuk perdagangan dan migrasi antar daerah, baik yang disponsori negara (migrasi) maupun migrasi spontan. 4) Pertumbuhan ekonomi akan lebih cepat pada suatu wilayah yang konsentrasi kegiatan ekonominya cukup tinggi .

Sedangkan menurut Adelman dan Morris (1973) memaparkan faktor-faktor yang menyebabkan ketimpangan pendapatan di negara berkembang, yaitu 1) pertumbuhan penduduk yang cepat, yang mempengaruhi pendapatan per kapita, 2) adanya inflasi, 3) banyak investasi pada proyek-proyek padat modal, sehingga pengembalian investasi dari sumber daya tambahan . lebih besar dari persentase pendapatan pekerja, meningkatnya pengangguran, 4) mobilitas sosial yang rendah, dan 5) inelastisitas permintaan ekspor pemerintah, menyebabkan depresiasi nilai tukar dalam perdagangan dengan negara maju. .

Keberlanjutan

Johnston et al. (2007) memperkirakan bahwa ada sekitar 300 definisi keberlanjutan. Berdasarkan analisis bibliometrik, artikel review yang membahas tema keberlanjutan (*sustainability*) pertama kali dikemukakan oleh Kenneth Sherman (1994) dengan artikel berjudul *sustainability, biomass yields, and health of coastal ecosystems: an ecological perspective*. Konsep keberlanjutan yang dikemukakan Sherman, sangat berkaitan dengan hasil Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Lingkungan dan Pembangunan (UNCED) pada tahun 1992. Deklarasi UNCED tentang lautan secara eksplisit merekomendasikan agar negara-negara di dunia: (1) mencegah, mengurangi, dan mengendalikan degradasi lingkungan laut untuk mempertahankan dan meningkatkan kapasitas pendukung kehidupan dan

produktifnya; (2) mengembangkan dan meningkatkan potensi sumber daya hayati laut untuk memenuhi kebutuhan gizi manusia, serta tujuan sosial, ekonomi, dan pembangunan; dan (3) mempromosikan pengelolaan terpadu dan pembangunan berkelanjutan wilayah pesisir dan lingkungan laut.

Mange et al. (1993), berpendapat bahwa 'penggunaan berkelanjutan' sumber daya terbarukan dapat dicapai ketika manusia menggunakan komponen ekosistem hidup yang memungkinkan proses alami untuk menggantikan apa yang digunakan. Dalam kondisi ini, ekosistem 'akan memperbaharui dirinya tanpa batas dan penggunaan manusia akan berkelanjutan'. Holling (1993), keberlanjutan berfokus pada ekosistem untuk mendukung 'pembangunan sosial dan ekonomi suatu wilayah dengan tujuan untuk berinvestasi dalam pemeliharaan dan pemulihan fungsi ekosistem kritis, untuk mensintesis dan membuat pengetahuan dan pemahaman yang dapat diakses untuk ekonomi, dan untuk mengembangkan dan mengkomunikasikan pemahaman yang memberikan landasan kepercayaan bagi warga.

Costanza (1992), agar ekosistem sehat dan berkelanjutan, suatu ekosistem harus mempertahankan tingkat aktivitas metabolismenya, struktur internal dan organisasinya, dan harus tahan terhadap tekanan eksternal terhadap ekosistem. Keberlanjutan dapat didefinisikan sebagai situasi di mana aktivitas manusia dilakukan dengan cara melestarikan fungsi ekosistem bumi (ISO 15392, 2008), transformasi gaya hidup manusia yang mengoptimalkan kemungkinan bahwa kondisi kehidupan akan terus mendukung keamanan, kesejahteraan, dan kesehatan, terutama dengan menjaga pasokan barang dan jasa yang tidak dapat diganti (McMichael et al., 2003), atau pelestarian tanpa batas dari semua bentuk kehidupan (Ehrenfeld, 2005).

Komisi Brundtland (1987), memberikan definisi keberlanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Kates et al., (2005), meskipun pada awalnya didorong oleh masalah lingkungan, tantangan nyata pembangunan berkelanjutan setidaknya sama heterogen dan kompleks dengan keragaman manusia dalam masyarakat dan ekosistem alam di seluruh dunia. Munculnya kekhawatiran tentang risiko lingkungan skala global, seperti penipisan ozon, perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati atau perubahan siklus nitrogen, memicu serangkaian diskusi internasional tentang sifat lingkungan, masyarakat, dan ekonomi yang kompleks dan saling berhubungan secara dinamis (Kates et al., 2005). Diskusi ini menantang kerangka kerja pembangunan yang terlalu disederhanakan dan asumsi mereka tentang pertumbuhan ekonomi.

Konferensi Stockholm pada tahun 1972 dan laporan *The Limits to Growth* (LTG) memiliki dampak yang luas karena interpretasi mereka tentang “pembangunan” dan “lingkungan” sebagai elemen kontradiktif dari pertukaran intrinsik (Sachs, 2015). Menurut Elkington (1997), keberlanjutan tiga 3 pilar utama atau *triple bottom line* yaitu manusia, keuntungan dan bumi. Setelah KTT Dunia pada tahun 2002, *triple bottom line* telah disebut sebagai integrasi yang seimbang antara kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial. Ketiga bidang tersebut saling terkait secara sistemik dan terus menerus dan secara kumulatif saling mempengaruhi satu sama lain melalui kausalitas timbal balik dan umpan balik positif (Mckelvey, 2002). Dengan kata lain, mereka bertindak sebagai pilar yang saling bergantung dan saling memperkuat (Majelis Umum PBB, 2005). Geissdoerfer et al. (2017) menyimpulkan bahwa sifat keberlanjutan terdiri atas holistik, adaptif, dan fleksibel, istilah keberlanjutan sebagai integrasi yang seimbang dan sistemik dari kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan dan antargenerasi.

Analisis pertumbuhan ekonomi tipologi klassen

Aswandi dan Kuncoro (2002), Tipologi Klassen hakekatnya membagi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan per kapita daerah. Dimana rata-rata pertumbuhan ekonomi sebagai sumbu vertikal sedangkan rata-rata pendapatan per kapita sebagai sumbu horizontal. Pembagian daerah dibedakan menjadi empat klasifikasi atau kelompok, yakni daerah cepat-maju dan cepat-tumbuh (high growth and high income), daerah maju tapi tertekan (high income but low growth), daerah berkembang cepat (high growth but low income) dan daerah relatif tertinggal (low growth and low income).

Empat klasifikasi wilayah berdasarkan Analisis Tipologi Klassen. Kuadran I, Wilayah cepat-maju dan cepat-tumbuh (high growth and high income) dimana wilayah yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita yang lebih tinggi dari rata-rata wilayah agregatnya. Kuadran II, Wilayah maju tetapi tertekan (high income but low growth) dimana wilayah yang memiliki pendapatan perkapita yang lebih tinggi, tetapi laju pertumbuhan ekonominya lebih rendah dari rata-rata wilayah agregatnya. Kuadran III, Wilayah relatif tertinggal (low growth and low income) dimana wilayah yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita yang lebih rendah dari rata-rata wilayah agregatnya. Sedangkan Kuadran IV, Wilayah berkembang cepat (high growth but low income) dimana wilayah yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi pendapatan perkapitanya lebih rendah dari rata-rata wilayah agregatnya.

Gambar 2 Klasifikasi Tipologi Klassen
Rata-rata laju pertumbuhan ekonomi
per tahun (g)

		Rata-rata laju pertumbuhan ekonomi per tahun (g)	
		Dibawah rata2 wil agregat	Diatas rata2 wil agregat
PDRB PER KAPITA (gk)	Diatas rata2 wilayah agregat	<p>Kuadran II Wilayah maju, tetapi tertekan $g_i < g; g_{ki} > g_k$</p> <p>(Daerah yang memiliki pdrb per kapita lebih tinggi, tetapi pertumbuhan ekonomi lebih rendah)</p>	<p>Kuadran I Wilayah cepat maju dan cepat tumbuh $g_i > g; g_{ki} > g_k$</p> <p>(Daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi dan pdrb per kapita lebih tinggi)</p>
	Dibawah rata2 wilayah agregat	<p>Kuadran IV Wilayah relatif terbelakang $g_i < g; g_{ki} < g_k$</p> <p>(Daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pdrb per kapita lebih rendah)</p>	<p>Kuadran III Wilayah berkembang cepat $g_i > g; g_{ki} < g_k$</p> <p>(Daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi, tapi pdrb per kapita lebih rendah)</p>

Keterangan:

g = Rata-rata laju Pertumbuhan Ekonomi Wil Agregat

g_i = Rata-rata laju pertumbuhan ekonomi wil diamati

g_k = PDRB per kapita wil agregat

g_{ki} = PDRB Per kapita wil diamati

Williamson dan Indeks Entropi Theil

Indeks Ketimpangan Williamson (Williamson Index of Inequality) dan Indeks Entropi Theil (Theil's Entropy Index) merupakan metode yang sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan wilayah. Kuncoro (2004), untuk menentukan angka ketimpangan wilayah digunakan Indeks Williamson dengan rumus sebagai berikut:

$$I_w = \frac{\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (y_i - y)^2 (F_i / n)}{y}}}{y}$$

Keterangan:

I_w = Indeks Williamson

Y_i = Pendapatan perkapita kabupaten ke- i

Y = Pendapatan perkapita Provinsi Jambi

F_i = Jumlah penduduk kabupaten i

n = Jumlah penduduk Provinsi Jambi

Adapun kriteria hasil yang digunakan adalah:

Indeks > 1 = ketimpangan sangat tinggi

Indeks $0,7 - 1$ = ketimpangan tinggi

Indeks $0,4 - 0,69$ = ketimpangan sedang

Indeks < 0,39 = ketimpangan rendah

Indeks Entropi Theil mengukur ketimpangan dengan menghitung rasio antara entropi pendapatan di antara kelompok dan entropi total pendapatan dengan rumus sebagai berikut:

$$I_{\text{theil}} = \sum (y_i/Y) \times \log [(y_i/Y)/(x_i/X)]$$

Keterangan:

I_{theil} = Indeks entropi theil

y_i = PDRB per kapita kabupaten/kota i

Y = Rata-rata PDRB per kapita Provinsi Jambi

x_i = Jumlah penduduk kabupaten/kota i

X = Jumlah penduduk Provinsi Jambi

Menurut Kuncoro (2004), Nilai indeks Entropi Theil = 0 dapat diartikan sebagai pemerataan sempurna dan bila indeks semakin menjauh dari nol maka terjadi ketimpangan yang semakin besar.

Analisis Promethee

Fauzi (2019) menjelaskan metode promethee pertama kali dikembangkan oleh Brans et al. (1984) yang disempurnakan oleh Brans et al (1985, 1986), Briggs et al (1990) dan Mladlineo dan Margeta (1987). Promethee (Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluations) adalah suatu teknik pengambilan keputusan multikriteria yang digunakan untuk membantu pengambil keputusan dalam memilih alternatif yang terbaik dari beberapa alternatif yang tersedia (Fauzi, 2019). Menurut Dicky dan Defit (2017), Promethee adalah salah satu metode penentuan urutan atau prioritas dalam analisis multikriteria. Kriteria yang digunakan dalam Promethee adalah penggunaan nilai dalam hubungan outranking.

Variabel untuk mengukur pencapaian pembangunan berkelanjutan variabel ekonomi yang meliputi PDRB per kapita di Kabupaten/kota dan Pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota variabel sosial yang meliputi indeks pembangunan manusia (IPM) dan Angka harapan hidup. Sedangkan variabel lingkungan yang meliputi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

METODOLOGI

Obyek penelitian dalam penelitian adalah struktur perekonomian wilayah, ketimpangan dan pencapaian pembangunan berkelanjutan di Provinsi Jambi. Metode penelitian menggunakan metode kuantitatif. Data sekunder yang digunakan berupa data time series tahun 2012-2021 yang bersumber dari BPS Provinsi Jambi, RPJMD Provinsi Jambi 2021-2026, dan

RTRW Provinsi Jambi 2022, IPM Provinsi Jambi 2021 dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2020. Teknik analisis data dilakukan dengan metode Tipologi Klassen, indeks ketimpangan Williamson dan Indeks Entropi Theil serta analisis keberlanjutan Multi kriteria Promethee.

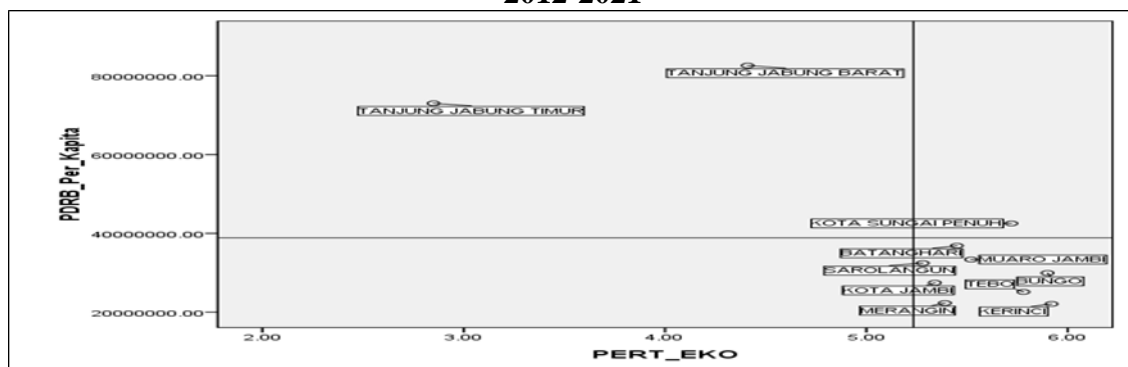
HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertumbuhan ekonomi tipologi klassen

Secara umum alat analisis Tipologi Klassen bertujuan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. Seperti yang telah dijelaskan Tipologi Klassen hakekatnya membagi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan per kapita daerah (Aswandi dan Kuncoro, 2002).

Berdasarkan hasil analisis tipologi kelas, daerah/kota di Provinsi Jambi yang termasuk dalam kuadran Kelas I daerah maju dan cepat tumbuh adalah Kota Sungai Penuh. Kuadran II, daerah maju tapi tertekan adalah Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat. Daerah di Kuadran III yang memiliki potensi atau dapat berkembang dengan cepat antara lain Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tebo, Kabupaten Bungo, Kabupaten Jambi, dan kota-kota lainnya. Pada kuadran IV, daerah relatif tertinggal, namun kategori ini tidak termasuk daerah/kota. Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3 sebagai berikut .

Gambar 3 Pola dan Struktur Ekonomi Berdasarkan Tipologi Klassen di Provinsi Jambi 2012-2021



Kota Sungai Penuh (Kuadran I) memiliki kinerja laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita yang lebih besar dibandingkan Provinsi Jambi secara keseluruhan. Kota Sungai Penuh memiliki beragam potensi ekonomi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kota Sungai Penuh, seperti pengembangan sektor pertanian komoditas seperti kelapa sawit, karet, dan kakao. Sektor pariwisata seperti Air Terjun Batang Merangin, Danau Kerinci, dan Taman Nasional Kerinci

Seblat. Sektor industri pabrik pengolahan kelapa sawit dan karet. Sektor perdagangan terutama dengan adanya pusat perdagangan di pusat kota karena Kota Sungai Penuh berada di jalur transportasi antara Sumatera Selatan dan Jambi.

Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat (Kuadran II), daerah ini memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dari provinsi Jambi, namun PDRB per kapitanya lebih tinggi dari provinsi Jambi. Lazimnya, kawasan ini tergolong relatif maju, namun dalam beberapa tahun terakhir laju pertumbuhannya melambat akibat tekanan pada kegiatan utama kawasan, yaitu. H. industri produksi minyak, gas dan batubara dan pertambangan, melambat.

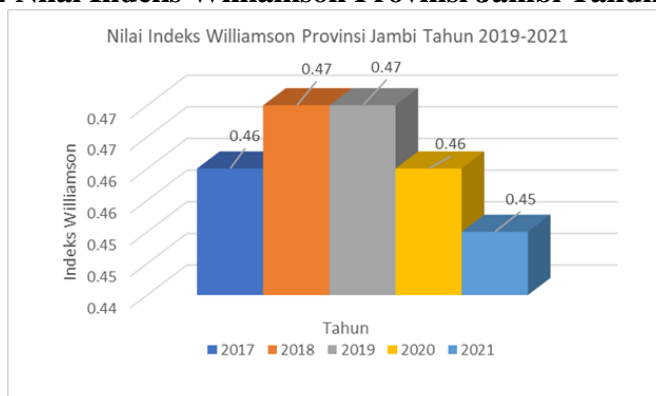
Sementara Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tebo, Kabupaten Bungo dan Kota Jambi (Kuadran III), merupakan kabupaten/kota yang mempunyai potensi sumber daya alam, serta mampu mengelola basis ekonomi sebagai pendukung sektor lain dalam pertumbuhan perekonomian. Kabupaten/kota perlu mempertahankan dan mengembangkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan PDRB per kapita agar dapat mengejar ketertinggalannya dengan daerah maju.

4.2 Ketimpangan wilayah indeks Williamson dan Indeks Enthropi Theil

Menurut Sjafrizal (2008), Adanya perbedaan antar wilayah mempengaruhi tingkat kesejahteraan sosial antar wilayah. Perspektif perbedaan pembangunan antar daerah ini juga mempengaruhi bagaimana pemerintah daerah melaksanakan kebijakan pembangunan daerah. Berdasarkan hasil penelitian Fleisher et al. (2007) menyatakan bahwa pemerintah harus meningkatkan dan mengembangkan ekonomi secara merata di seluruh wilayah dan tidak hanya di wilayah tertentu.

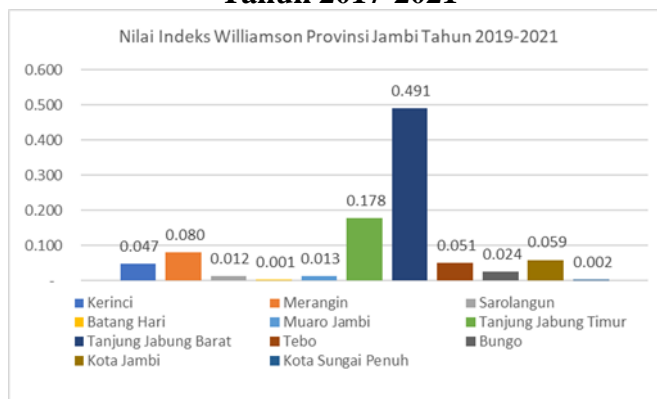
Berdasarkan hasil analisis indeks Williamson tahun 2019-2021 di Provinsi Jambi diketahui bahwa tingkat ketimpangan memiliki kriteria sedang. Indeks Williamson Tahun 2017 memiliki nilai sebesar 0.46 (sedang), Tahun 2018 memiliki nilai sebesar 0.47 (sedang), Tahun 2019 memiliki nilai sebesar 0.47 (sedang), tahun 2020 memiliki nilai 0.46 (sedang) dan tahun 2021 memiliki nilai 0.45 (sedang). Pada Indeks Williamson, PDRB per kapita merupakan salah satu sumber ketimpangan di Provinsi Jambi. Maka, diperlukan strategi dan kebijakan untuk meningkatkan PDRB per kapita setiap kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Sebagaimana terlihat pada gambar 4.

Gambar 4 Nilai Indeks Williamson Provinsi Jambi Tahun 2017-2021



Sementara berdasarkan hasil perhitungan dari tahun 2017-2021 berdasarkan kabupaten/kota di Provinsi Jambi, kriteria ketimpangan dari rendah sampai sedang. Ketimpangan Kabupaten Kerinci nilai 0.047, Kabupaten Merangin nilai 0.080, Kabupaten Sarolangun nilai 0.012, Kabupaten Batanghari nilai 0.001, Kabupaten Muaro Jambi nilai 0.013, Kabupaten Tanjung Jabung Timur nilai 0.178, Kabupateng Tanjung Jabung Barat nilai 0.491, Kabupaten Tebo nilai 0.051, Kabupaten Bungo nilai 0.024, Kota Jambi nilai 0.059 dan Kota Sungai Penuh dengan nilai 0.002. Sebagaimana terlihat pada gambar 5.

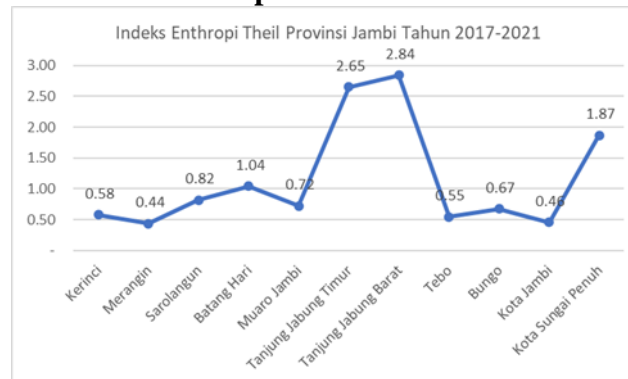
Gambar 5 Nilai Indeks Williamson Berdasarkan Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Tahun 2017-2021



Selain menggunakan indeks Williamson, indeks Entropy Theil dapat juga digunakan mengukur ketimpangan yang terjadi di masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Bila nilai indeks Entropi Theil = 0 maka pemerataan sempurna dan bila indeks semakin menjauh dari nol maka terjadi ketimpangan yang semakin besar. Berdasarkan hasil analisis Entropy Theil, dapat diketahui bahwa nilai indeks Entropi Theil terbesar berada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan nilai 2.84 dan nilai terendah berada di Kabupaten Merangin dengan nilai 0.44. Sesuai prinsip dari Indeks Entropi Theil apabila suatu kabupaten/kota memiliki Indeks yang semakin besar maka dapat dijustifikasi terjadinya ketimpangan/disparitas di wilayah tersebut. Sebagaimana terlihat pada gambar 6. Menurut hasil kajian Vulina dan Liana (2015), terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi nilai Entropi Theil yakni perbedaan sumber

daya alam antar wilayah, kondisi kependudukan, perbedaan kondisi geografis antar wilayah serta mobilitas perdagangan antar kabupaten/kota ke provinsi.

Gambar 6 Nilai Indeks Entrhopi Theil Provinsi Jambi Tahun 2017-2021



4.3 Pencapaian pembangunan berkelanjutan

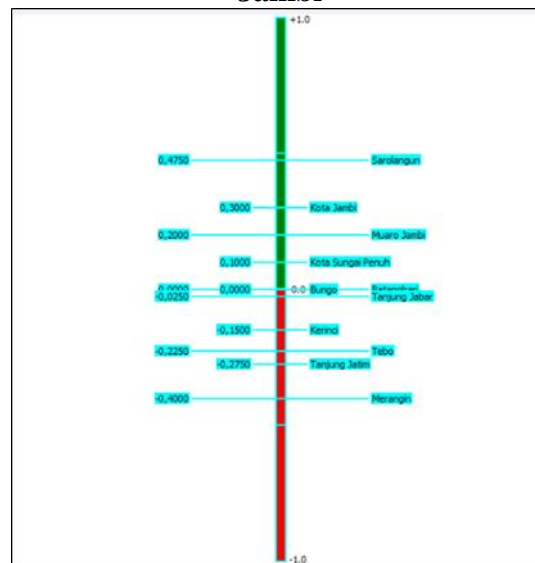
Dalam kajian pencapaian pembangunan berkelanjutan di Provinsi Jambi menggunakan variabel pertumbuhan ekonomi Tahun 2021, pendapatan per kapita Tahun 2021, indeks pembangunan manusia (IPM) Tahun 2021 dan indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) Tahun 2020, karena data terakhir yang dirilis terkait IKLH Kabupaten/Kota Provinsi Jambi secara keseluruhan tahun 2021 tidak tersedia.

Prosedur analisis Promethee adalah mengidentifikasi data tentang pencapaian pembangunan berkelanjutan, kemudian menentukan bad indikator (min) dan good indikator (max). Indikator dalam penelitian ini semuanya menggunakan good indikator. Langkah selanjutnya adalah menentukan fungsi preferensi yang akan menentukan hasil outranking dari analisis Promethee.

Berdasarkan hasil analisis menggunakan metode Promethee diketahui bahwa hasil ranking beserta skor net flow dari 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi yang memiliki pencapaian pembangunan berkelanjutan tertinggi adalah Kabupaten Sarolangun dengan skor 0,4750, Kota Jambi 0,3000, Kabupaten Muaro Jambi 0,2000, Kota Sungai Penuh 0,1000, Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Bungo memiliki skor yang sama 0,0000. Selanjutnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat -0,0250,

Kabupaten Kerinci -0,1500, Kabupaten Tebo 0,2250, Kabupaten Tanjung Jabung Timur -0,2750 dan yang paling terendah tingkat pencapaian pembangunan berkelanjutan adalah Kabupaten Merangin dengan skor mencapai -0,4000. Sebagaimana terlihat pada gambar 7.

Gambar 7 Ranking Promethee Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Jambi



Sementara hasil Promethee Rainbow dalam kajian pencapaian pembangunan berkelanjutan di Provinsi Jambi terlihat bahwa Kabupaten Sarolangun memiliki nilai positif dari 3 aspek, ekonomi, lingkungan dan sosial. Artinya bahwa Kabupaten Sarolangun telah memenuhi atau mencapai pembangunan berkelanjutan. Disusul Kota Jambi dengan kontribusi terbesar aspek sosial dan lingkungan, sementara rendah atau negatif pada aspek ekonomi. Kabupaten Muaro Jambi memiliki nilai positif lingkungan dan ekonomi, nilai negatif pada aspek sosial. Kota Sungai Penuh memiliki nilai positif sosial dan ekonomi, nilai positif pada aspek lingkungan.

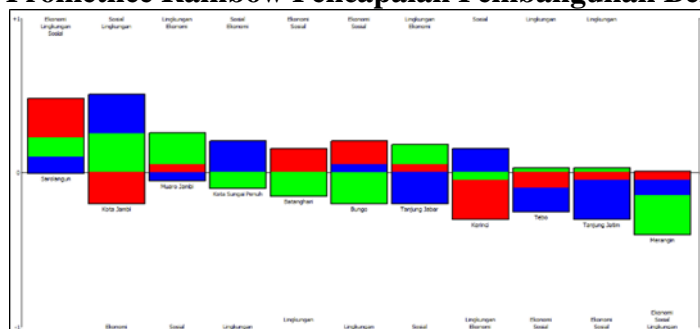
Kabupaten Batanghari memiliki kontribusi positif pada aspek ekonomi dan sosial, nilai negatif aspek lingkungan. Kabupaten Bungo memiliki nilai positif pada aspek ekonomi dan sosial, nilai negatif pada aspek lingkungan. Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki aspek positif pada lingkungan dan ekonomi, lemah atau negatif pada aspek sosial.

Kabupaten Kerinci memiliki nilai positif aspek sosial, sementara aspek lingkungan dan ekonomi masuk kategori negatif. Kabupaten Tebo dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki aspek positif pada lingkungan, lemah atau negatif pada aspek ekonomi dan sosial. Kabupaten Merangin tidak memiliki aspek positif, semua masuk kategori negatif aspek lingkungan, ekonomi dan sosial. Sebagaimana terlihat pada gambar 8.

Setelah melakukan analisis keberlanjutan, proses selanjutnya adalah mengembangkan strategi-strategi kebijakan yang menunjang capaian keberlanjutan (Fauzi, 2019). Sebagaimana terlihat pada gambar 8, permasalahan capaian pembangunan berkelanjutan di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi memiliki permasalahan yang berbeda. Misalnya Kota Jambi,

memiliki nilai tertinggi di aspek sosial dan lingkungan, namun memiliki permasalahan di aspek ekonomi. Maka, strategi yang diperlukan dalam pengambilan kebijakan adalah Pemerintah Kota Jambi berupaya meningkatkan aspek ekonomi melalui pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita dengan tetap mempertahankan aspek sosial dan lingkungan.

Gambar 8 Promethee Rainbow Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan



SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jambi yang termasuk Kuadran I adalah Kota Sungai Penuh. Kuadran II adalah Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat. Sedangkan Kuadran III adalah Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tebo, Kabupaten Bungo dan Kota Jambi. Kuadran IV tidak terdapat kabupaten/kota yang termasuk kategori ini.

Hasil Indeks Williamson memiliki kriteria ketimpangan dari rendah sampai sedang. Nilai ketimpangan rendah berada di Kabupaten Batanghari dan nilai ketimpangan tinggi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sedangkan Nilai indeks Enthropi Theil terbesar berada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan nilai 2.84 dan nilai terendah berada di Kabupaten Merangin dengan nilai 0.44.

Hasil analisis pencapaian pembangunan berkelanjutan menggunakan metode Promethee diketahui bahwa Kabupaten Sarolangun memiliki skor tertinggi 0,4750 dan paling terendah tingkat pencapaian pembangunan berkelanjutan adalah Kabupaten Merangin dengan skor mencapai -0,4000.

REFERENCES

- Adelman, I. and C.T. Morris (1973). *Economic Growth and Social Equity in Developing Countries*. Stanford CA: Stanford University Press.
- Ali Ibrahim Hasyim. 2016. *Ekonomi Makro*. Jakarta: Kencana.
- Anwar, A. 2001. *Pembangunan Wilayah Perdesaan dengan Desentralisasi Spasial Melalui Pembangunan Agropolitan yang Mereplikasi Kota-Kota Menengah dan Kecil*. Makalah disampaikan pada Pembahasan Proyek Perintisan Pengembanagan Wilayah Perdesaan, Jakarta 15 November 2001
- Arsyad Lincolin. 1999. *Ekonomi Pembangunan: Edisi keempat*. Yogyakarta: STIE YKPN
- Aswandi, Hairul dan Kuncoro, M. 2002. *Evaluasi Penetapan Kawasan Andalan: Studi Empiris di Kalimantan Selatan 1993 – 1999*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia. Vol 17, No. 1, Hal. 27-45.
- BPS Provinsi Jambi. *Jambi Dalam Angka 2022*.
- BPS Provinsi Jambi. *PDRB Perkapita Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2010-2021*
- BPS Provinsi Jambi. *Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2010-2021*
- BPS Provinsi Jambi. *Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jambi 2021*
- Brundtland, G.H., 1987. *Our common future: Report of the 1987 World Commission on Environment and Development*. United Nations, Oslo.
- Costanza, R., Norton, B. G., & Haskell, B. D. (Eds.). 1992. *Ecosystem health: new goals for environmental management*. Island Press.
- Dicky Nofriansyah dan Sarjon Defit. 2017. *Multi Criteria Decision Making (MCDM) Pada Sistem Pendukung Keputusan*. Yogyakarta: Depublish.
- Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. *Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi 2022*
- DLH Provinsi Jambi. *Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2020*.
- Ehrenfeld, J.R., 2005. *The roots of sustainability*. Sloan Manage. Rev. 46, 23– 25
- Elkington, J., 1997. *Cannibals with Forks: The triple bottom line of 21st century*. Capstone, Oxford.
- Fauzi, A. 2019. *Teknik Analisis Keberlanjutan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Friend, A. M. 2000. *Sustainable Development Indicators: Exploring the Objective Function*. Chemosphere, Vol. 33 No. 9
- Geissdoerfer, M., Savaget, P., M.P.Bocken, N., & JanHultink, E. 2017. *The Circular Economy - A new sustainability paradigm?* Journal of Cleaner Production, 143, 757-768.
- Holling, C. S. 1993. *Investing in research for sustainability*. Ecol. Appl. 3: 552-555
- Johnston, P., Everard, M., Santillo, D., Robért, K. 2007. *Reclaiming the definition of sustainability*. Environ. Sci. Pollut. Res. 14, 60–66.
- Kates, R.W., Parris, T.M., Leiserowitz, A.A., 2005. *What Is Sustainable Development? Goals, Indicators, Values, and Practice*. Environ. Sci. Policy 47, 8–21.

- Khabibah, Yuni. 2018. *Pengaruh Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Angkatan Kerja dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2016*. Undergraduate Thesis, IAIN Kudus.
- Kuncoro. Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi. Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Jakarta: Erlangga.
- Mangel, M., Hofman, R. J., Norse, E. A., Twiss, J. R. Jr. 1993. *Sustainability and ecological research*. Ecol. Appl. 3(4): 573-575
- Mckelvey, B., 2002. *Managing Coevolutionary Dynamics*. 8th EGOS Colloq.
- McMichael, A.J., Butler, C.D., Folke, C., 2003. *New visions for addressing sustainability*. Science, 302, 1919-1920.
- Pemerintah Provinsi Jambi. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026*
- Putra, Laurensius Julian Purwanjana. 2010. *Rumus Praktis Menguasai Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Boo Publisher
- Rahardjo Adisasmita. 2013. *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan wilayah, cetakan pertama*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Rustiadi, Ernan, Dkk. 2011. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Rakyat.
- Sachs, J., 2015. *The Age of Sustainable Development.*, Columbia University Press.
- Fulgang, Simon. 2013. *Determinants of Income Inequality: SubSaharan Perspective*. Thesis. Aarhus University.
- Sjafrizal. 2012. *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Tarigan, Robinson. 2007. *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi cetakan ke empat*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Todaro, P. Michael. 2000. *Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga Jilid I*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Todaro, P. Michael., & Stephen, S. 2004. *Pembangunan Ekonomi Dunia Kesembilan*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Vaulina, S & Liana L. 2015. *Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Wilayah di Provinsi Riau*. Jurnal Dinamika Pertanian (30), 261-273.
- Williamson, J.G. 1965. *Regional and Equality and The Process of National Development: A Description Patern*. Economic Development and Cultural Change, Vol. 13, No. 4